



RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

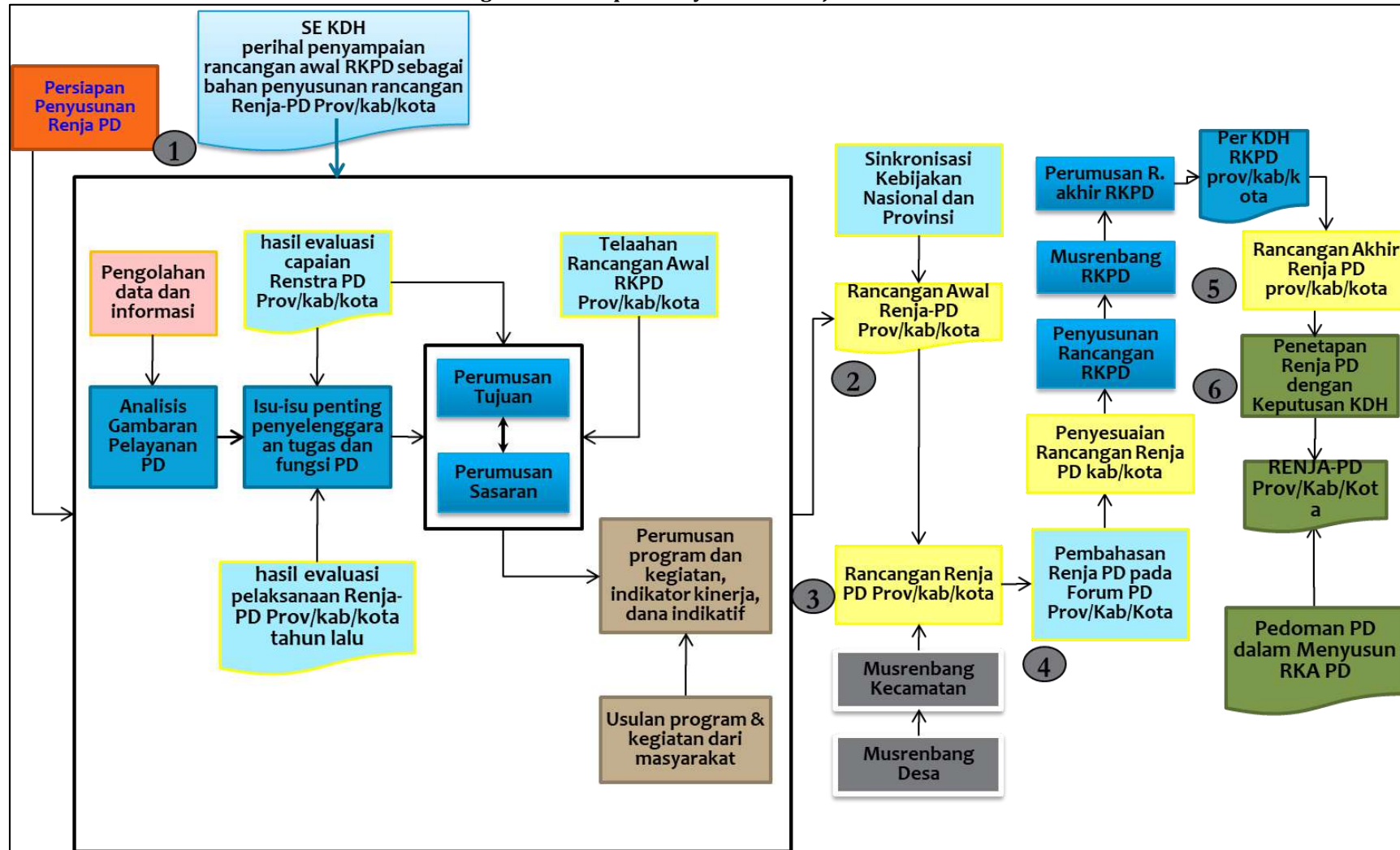
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan

- Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024;
 26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
 27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;

2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
- 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2019 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisis pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun 2019.
- b. Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 memuat 7 program dan 20 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renja Tahun 2019 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sampai dengan tahun 2020. Adapun Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada tabel T-C.29 di bawah ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2020

| Kode Rekening | Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output) | | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020 | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|---|---|---|--|---|--|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%) |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=5+7+9 | (11)=10/4*100 |
| 4.05. | URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| 4.05.4.05.03.16. | Program Fasilitas Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 1 | Persentase fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.05.4.05.03.16.01. | Fasilitas Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah | 1 | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim Otoda | 120 rakor | | 24 rakor | 36 rakor | | 24 rakor | 60 rakor | 50 |
| | | 2 | Jumlah dokumen kesepakatan bersama dan dokumen perjanjian kerjasama | 120 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama | | 24 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama | 36 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama | | 12 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama | 48 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama | 40 |
| 4.05.4.05.03.16.02. | Fasilitas Percepatan Pembakuan Rupa Bumi dan Batas Wilayah | 1 | Jumlah dokumen rupabumi/toponimi | 5dokumen dan 5 peta - | | 1 dokumen dan 1 peta - | 1 dokumen dan 1 peta - | | - | 1 dokumen dan 1 peta | 20 |
| | | 2 | Jumlah tapal batas wilayah yang di administrasikan | 350 patok batas desa | | 70 patok batas desa | 70 patok batas desa | | 53 patok batas desa | 123 patok batas desa | 35 |
| 4.05.4.05.03.16.03. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 1 | Jumah dokumen penyusunan LPPD dan ILPPD yang disusun | 10 dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | | 2 dokumen | 4 dokumen | 40 |
| 4.05.4.05.03.16.04. | Fasilitas Layanan Pemerintahan | 1 | Jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan | 70 kali | | 14 kali | 12 kali | | - | 12 kali | 17 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|----|
| | | 2 | Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan | 60 kunjungan | | 12 kunjungan | 16 kunjungan | | - | 16 kunjungan | 27 |
| | | 3 | Jumlah rakor yang dilaksanakan | 100 rakor | | 20 rakor | 12 rakor | | 20 rakor | 32 rakor | 32 |
| | | 4 | Jumlah rakor unsur FORKOPIMDA yang dilaksanakan | 120 kali | | 24 kali | 14 kali | | 24 kali | 38 kali | 32 |
| 4.05.4.05.03.1 6.05. | Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah | 1 | Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi terpadu satu pintu | 70 kecamatan | | 14 kecamatan | 14 kecamatan | | - | 14 kecamatan | 20 |
| | | 2 | Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi | 70 kecamatan | | 14 kecamatan | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | 28 kecamatan | 40 |
| 4.05.4.05.03.17 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 1 | Persentase Produk Hukum yang diundangkan | 100 % | | 100 % | 100 % | | 100 % | | |
| | | 2 | Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata Pemerintah Daerah yang ditangani | 100 % | | 100 % | 100 % | | 100 % | | |
| 4.05.4.05.03.1 7.01. | Penyusunan Produk Hukum | 1 | Jumlah Perda yang diundangkan | 58 Perda | | 10 Perda | 10 Perda | | 10 Perda | 22 Perda | 40 |
| | | 2 | Jumlah Perbup yang diundangkan | 250 Perbup | | 50 Perbup | 76 Perbup | | 50 Perbup | 164 Perbup | 40 |
| | | 3 | Jumlah Raperda | 25 Raperda | | 5 Raperda | 5 Raperda | | 2 Raperda | 7 Raperda | 40 |
| | | 4 | Jumlah Naskah Akademik | 25 Naskah Akademik | | 5 Naskah Akademik | 5 Naskah Akademik | | 2 Naskah Akademik | 7 Naskah Akademik | 40 |
| 4.05.4.05.03.1 7.02. | Fasilitasi Bantuan Hukum | 1 | Jumlah Kasus Hukum yang ditangani | 20 Kasus | | 4 Kasus | 4 Kasus | | 4 Kasus | 8 Kasus | |
| | | 2 | Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum | 1750 Org | | 350 Org | 350 Org | | 0 Org | 350 Org | |
| | | 3 | Jumlah Kadarkum yang dibina | 1125 Org | | 225 Org | 225 Org | | 0 Org | 225 Org | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|---|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.05.4.05.03.1 7.03. | Fasilitasi dokumentasi dan keputusan Bupati | 1 | Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa Buku Buletin edisi Juni dan Desember dan Lembaran Daerah tahun berjalan | 1800 Buku | | 360 Buku | 360 Buku | | 360 Buku | 720 Buku | |
| | | 2 | Jumlah Peserta Sosialisasi | 1750 org | | 350 org | 350 org | | 0 org | 350 org | |
| | | 3 | Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan | 2500 Kebup | | 500 Kebup | 498 Kebup | | 500 Kebup | 998 Kebup | |
| 4.05.4.05.03.18. | Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1 | Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.01.4.01.03.1 8.01. | Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 1 | Jumlah Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu | 201 Laporan | | 42 | 42 | 100 | 42 | 84 | 41 |
| | | 2 | Jumlah Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu | 5 laporan | | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40 |
| 4.05.4.05.03.1 8.02. | Penyusunan Analisa Jabatan | 1 | Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2 | Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 3 | Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai standar yang dibutuhkan SO dan Tupoksi PD | 100 | | 100 | 100 | 100 | - | - | 50 |
| 4.05.4.05.03.1 8.03. | Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah | 1 | Jumlah Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas, Kode Wilayah dan Pakaian Dinas | 3 perbup | | 3 | 3 | 100 | - | - | 50 |
| 4.05.4.05.03.1 9.04. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah | 1 | Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang | 1 perbup | | 1 perbup | 1 perbup | 100 | - | - | 100 |
| | | 2 | Persentase PD yang telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat daerah | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|---|----------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | 3 | Persentase PD yang telah dievaluasi Reformasi Birokrasi | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | 4 | Persentase PD yang telah menerapkan budaya kinerja | 40 | | 40 | 40 | 100 | - | - | 100 |
| 4.05.4.05.03.41. | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 1 | Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun | 100,00 | | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| 4.05.4.05.03.4.1.01. | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 1 | Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu | 100,00 | | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| | | 2 | Persentase Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terukur | 100,00 | | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| | | 3 | Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik | 320 unit kerja | | 64 unit kerja | 64 unit kerja | 100 | 64 unit kerja | - | 20 |
| 4.05.4.05.03.19. | Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah | 1 | Persentase fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| 4.05.4.05.03.1.9.01. | Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 | Jumlah Dokumen Pedoman dan Dokumen SSHB yang disusun | 5 dok | | 1 dok | 1 dok | 100 | 2 dok | 2 dok | 40 |
| | | 2 | Jumlah Koordinasi yang dilakukan | 50 kali | | 10 kali | 10 kali | 100 | | | 20 |
| | | 3 | Jumlah dokumen HSPK yang disusun | 5 dok | | 1 dok | 1 dok | 100 | 1 dok | 1 dok | 40 |
| 4.05.4.05.03.1.9.02. | Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah | 1 | Jumlah PD dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi | 3755 peserta | | 751 peserta | 751 peserta | 100 | 700 org | 700 org | 40 |
| 4.05.4.05.03.1.9.03. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun | 5 dok | | 1 dok | 1 dok | 100 | | | 20 |
| | | 2 | Jumlah Pengguna LPSE yang difasilitasi | 3750 pengguna | | 750 pengguna | 27000 pengguna | 3600 | | | 20 |
| | | 3 | Jumlah Sistem Informasi yang dikelola | 5 aplikasi | | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100 | | | 20 |
| 4.05.4.05.03.26. | Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan | 1 | Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik | 100 | | 100 | 99 | 99 | 100 | 199 | 199 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.05.4.05.03.2 0.01. | Pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa | 1 | Jumlah Dokumen Data Administrasi Pengadaan Barang/Jasa | 12 | | 12 | 12 | 100 | | | 100 |
| | | 2 | Jumlah Dokumen Hasil Tender | 300 | | | | | 100 | 100 | 33,33 |
| 4.05.4.05.03.2 0.02. | Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa | 1 | Jumlah Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 3 | | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 33,33 |
| 4.05.4.05.03.2 0.03. | Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang / Jasa | 1 | Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Secara e-Tendering | 400 | | 400 | 217 | 54 | | | |
| 4.05.4.05.03.2 0.04. | Pengelolaan LPSE | 1 | Jumlah Sistem Informasi yang dikelola | 2 | | 2 | 2 | 100 | | | 200 |
| 4.05.4.05.03.23 | Program Koordinasi dan penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1 | Jumlah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.05.4.05.03.2 3.01 | Koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan | 1 | Jumlah Koordinasi Bidang Pendidikan kebudayaan dan keagamaan | 33 kali | | 33 kali | 32 kali | 96,9 | 33 kali | 32 kali | 96,9 |
| 4.05.4.05.03.2 3.02 | Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan | 1 | Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan | 11 keg | | 11 keg | 11 keg | 100 | | | 100 |
| 4.05.4.05.03.2 3.03. | Koordinasi bidang tenaga kerjaan dan kependudukan | 1 | jumlah koordinasi bidang tenaga kerjaan dan kependudukan | 21 kali | | 21 kali | 19 kali | 90,5 | 21 | 21 | 100 |
| 4.05.4.05.03.2 3.03 | Koordinasi bidang sosial, keagamaan dan kesehatan | 1 | Jumlah koordinasi sosial, keagamaan dan kesehatan | 33 kali | | 33 kali | 32 kali | 96,9 | 33 kali | 32 kali | 96,9 |
| 4.05.4.05.03.37. | Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan | 1 | Jumlah informasi pemerintahan dan pembangunan | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| 4.05.4.05.03.42. | Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1 | Jumlah informasi pemerintahan dan pembangunan | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 |
| 4.05.4.05.03.3 7.02. | Fasilitasi pemberitaan dan penyebarluasan informasi | 1 | Jumlah pertemuan dengan wartawan | 7 kali | | 7 kali | 4 kali | 57 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 4.05.4.05.03.4 2.02 | Fasilitasi komunikasi pimpinan | 1 | Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi | 60 kunjungan | | | | 12 kunjungan | 12 kunjungan | | 20 |
| 4.05.4.05.03.2 2.01 | Fasilitasi acara dan dokumentasi | 1 | Jumlah acara dan dokumentasi | 240 kegiatan | | 240 kegiatan | 210 kegiatan | 88 | | | 36 |
| 4.05.4.05.03.4 2.03 | Fasilitasi dokumentasi pimpinan | 1 | Jumlah dokumentasi acara pimpinan | 1000 kegiatan | | | | | 200 kegiatan | 200 kegiatan | 20 |
| 4.05.4.05.03.3 7.04 | Fasilitasi kehumasan dan keprotokolan | 1 | Jumlah dokumentasi acara pimpinan | 310 kegiatan | | 310 kegiatan | 232 kegiatan | 75 | | | 20 |
| 4.05.4.05.03.2 2.03 | Fasilitasi keprotokoleran | 1 | Jumlah kegiatan keprotokoleran acara pimpinan | 1500 kegiatan | | | | | 300 kegiatan | 300 kegiatan | 20 |
| 4.05. | NON URUSAN | | | | | | | | | | |
| 4.05.4.05.03.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun dan | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 100 | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Jumlah rekening pemakaian jasa komunikasi (telepon, air, 43 Rekening listrik dan tv kabel | 43 | | 43 | 43 | 100 | 43 | 43 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah1 | 1 | Jumlah Jaminan atas Barang Milik Daerah | 3 | | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 1 | Jumlah Pemeliharaan Surat-Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 71 | | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1 | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor | 91 | | 91 | 91 | 100 | 91 | 91 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 10.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1 | Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor | 76 | | 76 | 76 | 100 | 76 | 76 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|------|--|------|------|-----|------|------|-----|
| 4.01.4.01.03.0 1.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1 | Jumlah surat-surat/blanko/formulir yang di perbanyak (cetak dan fotocopy/penggandaan) | 24 | | 24 | 24 | 100 | 24 | 24 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 1 | Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | 45 | | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai dan Layak Pakai | 11 | | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 | Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah | 3 | | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | Jumlah bahan bacaan koran dan majalah untuk Kantor Bupati Sampang dan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah | 1572 | | 1572 | 1572 | 100 | 1572 | 1572 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 | Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dina Bupati dan Wakil Bupati Sampang | 12 | | 12 | 2 | 100 | 12 | 2 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1 | Jumlah makanan dan minuman untuk rapat, tamu di Kantor Bupati Sampang dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 22 | | 22 | 22 | 100 | 22 | 22 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1 | Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah | 1473 | | 1473 | 1473 | 100 | 1473 | 1473 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis | 1 | Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah | 8 | | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 1.20 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 1 | Jumlah koordinasi dengan SKPD di kabupaten sampang | 299 | | 299 | 299 | 100 | 299 | 299 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.05.4.05.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 | Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1 | Jumlah kendaraan dinas/operasional (sepeda motor dinas) | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.05 | Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 1 | Jumlah perlengkapan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang | 6 | | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.10 | Pengadaan Meubelair | 1 | Jumlah kebutuhan meubelair yang layak pakai untuk prasarana kantor | 23 dan 1 | | 23 dan 1 | 23 dan 1 | 100 | 23 dan 1 | 23 dan 1 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.11 | Pengadaan Komputer | 1 | Jumlah peralatan komputer sebagai penunjang pekerjaan | 5 | | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.12 | Pengadaan Peralatan Kantor | 1 | Jumlah Peralatan kantor untuk produktifitas kerja PNS | 5 dan 1 | | 5 dan 1 | 5 dan 1 | 100 | 5 dan 1 | 5 dan 1 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.16 | Pengadaan alat-alat Komunikasi | 1 | Jumlah alat-alat komunikasi | 10 | | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.19 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 1 | Jumlah perlengkapan kantor untuk produktifitas kerja PNS | 12 | | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.20 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan | 1 | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 3 | | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1 | Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.23 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan | 1 | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang layak pakai | 10 | | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.24 | Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1 | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak | 20 | | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---|------------|--|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
| 4.01.4.01.03.0 2.29 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur | 1 | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Meubelair | 80 | | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.30 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor dalam kondisi layak pakai | 258 | | 258 | 258 | 100 | 258 | 258 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 2.34 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | 1 | Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas | 2 | | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 4.05.4.05.03. 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1 | Persentase aparatur yang berpakaian dinas sesuai | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 3.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 1 | jumlah pembuatan pakaian dinas KDH/ WKDH untuk bupati, PDH untuk sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati | 12 | | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 3.02 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 1 | Jumlah pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan rumah dinas | 25 | | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 |
| 4.05.4.05.03. 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1 | Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 5.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1 | Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan sekretariat daerah kabupaten sampang | 6 dari 145 | | 6 dari 145 | 6 dari 145 | 100 | 6 dari 145 | 6 dari 145 | 100 |
| 4.05.4.05.03. 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1 | Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 6.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 1 | Jumlah Laporan Semesteran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---|---------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 4.01.4.01.03.0 6.04 | | | Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 4.01.4.01.03.0 6.05 | | | Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD tahun berikutnya | 2 | | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| | | 1. | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 0,76 | | 0,10 | 0,10 | 100 | 0,10 | 0,10 | 100 |
| 4.05. | URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| 4.05.4.05.03.1 9.06. | Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/ IKM | 1 | Jumlah SKM PD yang di susun | 42 | | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 | 100 |
| 4.05.4.05.03.21. | Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah | 1 | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif | 125 | | 35 | 36 | 102,86 | 42 | 42 | 100 |
| | | 2 | Kontribusi BUMD terhadap PAD (%) | 28,47% | | 3,81% | 3,69% | 96,85 | 12.05% | 12.05% | 100 |
| 4.01.4.01.03.2 1.01. | Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam | 1 | Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP | 355 | | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| | | 2 | Jumlah pelaksanaan jasmas di kecamatan | 5 | | 5 | 5 | 100 | | | |
| | | 3 | Jumlah survey lokasi yang dilakukan | 5 | | 5 | 5 | 100 | | | |
| | | 4 | Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA | 107 | | | | | 12 | 12 | 100 |
| 4.01.4.01.03.2 1.02. | Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian | 1 | Jumlah koordinasi dengan OPD terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif dan pengembangan UMKM | 32 | | 32 | 34 | 106 | | | |
| | | 2 | Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif | 20 | | 20 | 20 | 100 | | | |
| | | 3 | Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata | 148 | | | | | 24 | 24 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 4 | Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait 5 mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata | 225 | | | | | 36 | 36 | 100 |
| 4.01.4.01.03.2 1.03. | Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 1 | Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD | 217 | | 30 | 35 | 116,667 | 33 | 33 | 100 |
| | | 2 | Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD | 504 | | 78 | 117 | 150 | 80 | 80 | 100 |
| | | 3 | Audit Apotek Trunojoyo Sampang | 1 | | | | | 1 | 1 | 100 |
| 4.05.4.05.03.24. | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | 1 | Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.01.4.01.03.2 4.01. | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai | 2024 | | 524 | 524 | 200 | 300 | 300 | 100 |
| 4.05.4.05.03.25. | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal | 1 | Persentase jumlah merk rokok ilegal yang dilaporkan ke bea cukai | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.01.4.01.03.2 5.01. | Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran/tempat penjual eceran | 1 | Monitoring peredaran rokok ilegal | 42 | | 42 | 42 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|-----|--|--|--|
| | | 2 | Pembuatan dokumen/laporan cukai rokok ilegal | 1 | | 1 | 1 | 100 | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|-----|--|--|--|

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2018 nihil, dikarenakan Periode Resntra Sekretariat Daerah adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai hanya Tahun 2019 saja; dan
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Sekretariat Daerah yang baru.

Pada tahun anggaran 2019 anggaran Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sebesar Rp.35.188.551.784,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.055.954.084,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.24.132.597.700,00 dengan total realisasi sebesar Rp.32.956.866.251,00 (93,6%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10.538.523.360,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.22.418.342.891,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program dan 45 kegiatan.

Realisasi dan faktor penyebab program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

Anggaran Sekretariat Daerah pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2019

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----|---|-------------------|-------------------|-------|
| 1) | Bagian Umum | 23.482.096.526,00 | 22.464.743.827,00 | 95,67 |
| 2) | Bagian Pemerintahan | 1.379.020.000,00 | 1.349.415.363,00 | 97,85 |
| 3) | Bagian Hukum | 984.457.000,00 | 937.028.891,00 | 95,18 |
| 4) | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 3.130.067.650,00 | 2.692.663.189,00 | 86,03 |
| 5) | Bagian Perekonomian dan SDA | 417.908.100,00 | 394.761.177,00 | 94,46 |
| 6) | Bagian Administrasi Pembangunan | 1.119.080.500,00 | 1.060.770.007,00 | 94,79 |
| 7) | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 766.916.800,00 | 722.780.046,00 | 94,24 |
| 8) | Bagian Organisasi | 1.413.326.000,00 | 1.200.215.859,00 | 70,26 |
| 9) | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 809.534.000,00 | 584.429.933,00 | 72,19 |

Berdasarkan tabel pelaksanaan program dan kegiatan terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Tahun Anggaran 2019 Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah untuk indikator Kontribusi BUMD terhadap PAD berhasil memberikan kontribusi sebesar
- Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020*

3,69% dengan target kontribusi sebesar 3,81% atau dengan kata lain capaian indikator output ini sebesar 96,85% dari target yang direncanakan. Rincian capaian indikator Kontribusi BUMD PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari nilai PAD BUMD (hasil kekayaan daerah yang dipisahkan) sebesar Rp. 6.236.679.300,72 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah tujuh puluh dua sen) sedangkan total PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 168.778.008.507,65 (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah enam puluh lima sen). Secara kuantitatif realisasi nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) tersebut sudah melebihi target nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) untuk tahun anggaran 2019, yakni Rp. 6.206.365.750,35 (enam milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah tiga puluh lima sen). Namun karena realisasi PAD Kabupaten Sampang nilainya diatas nilai target PAD kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 yakni Rp. 162.994.854.462,35 (seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen). Sehingga nilai akhir perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD lebih kecil dibandingkan target perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD untuk Tahun Anggaran 2019. Sehingga untuk tahun berikutnya perl dilakukan Penentuan Target PAD Kabupaten Sampang untuk Tahun Anggaran berikutnya harus ditingkatkan. Sehingga mampu memacu BUMD Kabupaten Sampang untuk lebih meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran berikutnya.

- 2) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Bagian Humas Tahun Anggaran 2019 yang pada tahun 2020 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Program hubungan masyarakat dan keprotokolan Pelaksanaan *Pers Gathering* pada tahun 2019 menyesuaikan jadwal Yth. Bupati Sampang. Selain itu, perubahan kebijakan dari semula dilaksanakan sebulan sekali menjadi tiga bulan sekali, kemudian Belanja Kegiatan Dokumentasi menyesuaikan kegiatan Yth. Bupati Sampang dan Belanja lembur pada Sub Bagian Keprotokolan tidak bisa terserap karena sudah digantikan dengan adanya TPP.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang / Jasatidak mencapai target dengan alasan :

Kegiatan ini bersifat insidental yaitu dalam hal pencapaian target jumlah paket yang dilaksanakan secara e-Tendering. Pencapaian target menyesuaikan dengan jumlah permohonan paket pelelangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di masing-masing Perangkat Daerah maupun penggunaan tenaga ahli karena hal ini menyesuaikan dengan permintaan pokja pengadaan selama proses pelelangan.

Jumlah paket pengadaan barang yang seharusnya e-tender berubah menjadi e-Purchasing karena barangnya tercantum di dalam e-katalog.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana terdapat perubahan pada batasan nilai maksimal Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi juga mempengaruhi jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara e-Tendering.

Tidak dilakukan perubahan target kinerja pada Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) TA. 2019.

Solusi. Menetapkan target kinerja yang wajar sesuai dengan evaluasi pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran lebih berhati-hati lagi dan diperhitungkan secara matang sesuai dengan indikator kinerja yang ditargetkan.

- 4). Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Tahun Anggaran 2019 Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah untuk indikator Kontribusi BUMD terhadap PAD berhasil memberikan kontribusi sebesar 3,69% dengan target kontribusi sebesar 3,81% atau dengan kata lain capaian indikator output ini sebesar 96,85% dari target yang direncanakan.

Rincian capaian indikator Kontribusi BUMD PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari nilai PAD BUMD (hasil kekayaan daerah yang dipisahkan) sebesar Rp. 6.236.679.300,72 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah tujuh puluh dua sen) sedangkan total PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 168.778.008.507,65 (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah enam puluh lima sen).

Secara kuantitatif realisasi nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) tersebut sudah melebihi target nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) untuk tahun anggaran 2019, yakni Rp. 6.206.365.750,35 (enam milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah tiga puluh lima sen). Namun karena realisasi PAD Kabupaten Sampang nilainya diatas nilai target PAD kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 yakni

Rp. 162.994.854.462,35 (seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen).

Sehingga nilai akhir perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD lebih kecil dibandingkan target perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD untuk Tahun Anggaran 2019.

Solusi

Penentuan Target PAD Kabupaten Sampang untuk Tahun Anggaran berikutnya harus ditingkatkan. Sehingga mampu memacu BUMD Kabupaten Sampang untuk lebih meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Tahun 2019-2024 | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|-----|--|----------------------|-----|--------------------------------|---------|-------|-------|-------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Nilai Sakip | | | B | 80,01/A | 82/A | 84/A | 64,23/B | 80,01/A | 82/A | 84/A | |
| a. | Nilai EKPPD | | | 3,5 | 3,1 | 3,21 | 3,22 | 2,83 | 3,1 | 3,21 | 3,22 | |
| b. | Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum | | | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | |
| c. | Nilai Sakip | | | | | | | | | | | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | 82 | 81,05 | 81,55 | 81,75 | 80,40 | 81,05 | 81,55 | 81,75 | |
| a | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | 82 | 81,05 | 81,55 | 81,75 | 80,40 | 81,05 | 81,55 | 81,75 | |
| 3 | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | | | 0,76 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,76 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Tahun 2019-2024 | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|-----|---|----------------------|-------------|--------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|-----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| a | Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi pemkab | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 5 | Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Pemkab | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 6 | Persentase penataan otonomi daerah yang diadministrasikan | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 7 | Persentase Kecamatan yang dilaksanakan Pembinaan | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 8 | Laporan Penyelesaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berkualitas | | 16 Februari | 16 Februari | | | | 16 Februari | | | | |
| 9 | Persentase PD yang menyusun Anforjab | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 10 | Persentase Peraturan Bupati yang diundangkan tepat waktu | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 11 | Persentase Keputusan Bupati yang diundangkan tepat waktu | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 12 | Persentase Perda yang diundangkan tepat waktu | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 13 | Persentase Perda yang dilakukan konsultasi publik | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 14 | Persentase Kasus Hukum yang difasilitasi | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 15 | Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat waktu | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 16 | Persentase paket pengadaan b/j yang dilaksanakan secara e-Tendering | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |
| 17 | Persentase koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang difasilitasi | | 100% | 5 | | | | 5 | | | | |
| 18 | Persentase Kegiatan Pemerintah yang dipublikasikan | | 100% | 4 | | | | 4 | | | | |
| 19 | Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu | | 100% | 100% | | | | 100% | | | | |

Jika dilihat tabel di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan nilai 64,99 atau predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.6 Hasil Capaian Nilai SAKIP Tahun 2018 dan 2019

| Komponen yang dinilai | | 2018 | | 2019 | |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Bobot | Bobot | Bobot | Bobot |
| A | Perencanaan kinerja | 30 | 19,00 | 30 | 23,14 |
| B | Pengukuran kinerja | 25 | 13,69 | 25 | 16,79 |
| C | Pelaporan kinerja | 15 | 9,15 | 15 | 9,98 |
| D | Evaluasi internal | 10 | 3,13 | 10 | 5,83 |
| E | Capaian kinerja | 20 | 10,85 | 20 | 9,24 |
| Nilai hasil evaluasi | | 100 | 64,23 | 100 | 64,99 |
| Tingkat akuntabilitas kinerja | | | B | | B |

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 :

1. Secara umum terdapat peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sampang meskipun belum signifikan, Pemerintah Kabupaten telah menyusun RPJMD dengan ukuran keberhasilan yang lebih baik, akan tetapi perlu dibuktikan lagi *sustainability* atas dokumen perencanaan yang telah disusun.
2. Tema Pembangunan yang tertera dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi dasar pembangunan kinerja tahun berkenaan. Hal ini tersebut terlihat pada proses penganggaran dan program prioritas.
3. Penyusunan peta proses bisnis organisasi, cascading kinerja dan cross-cutting pencapaian kinerja pada RPJMD belum sepenuhnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pola hubungan kinerja antar level belum terlihat dengan baik.
4. Perencanaan Kinerja dan peta proses bisnis organisasi pada satuan kerja belum dijabarkan dengan baik pada dokumen penganggaran.
5. Upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran, sehingga belum bisa dikelompokkan antara program prioritas dan non prioritas. Selain itu, terdapat kecenderungan belum

adanya review atas keberadaan kegiatan yang ada untuk menjawab permasalahan dan isu strategis terkini.

Upaya perbaikan SAKIP Tahun 2020 :

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah daerah dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
 2. Meningkatkan upaya implementasi manajemen kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan benar-benar sebagai pedoman pelaksanaan kerja
 3. Agar setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan peta proses bisnis dan cascading kinerja berdasarkan RPJMD mulai dari eselon II sampai pejabat pelaksana dalam upaya mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi/instansi
 4. Dalam rangka optimalisasi implementasi SAKIP, diperlukan aplikasi manajemen kinerja yang diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai bank data dan dasar perencanaan kinerja
 5. Meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah pengampu akuntabilitas kinerja (Bapelitbangda, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda) sehingga pelaksanaan akuntabilitas kinerja lebih cepat dan terarah.
-
2. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tingkat Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,3114 atau dengan kategori prestasi tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018. Sedangkan perkembangan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperoleh Kabupaten Sampang selama periode sebelumnya adalah sebagaimana tersaji dalam grafik III.2.
 3. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesra, bidang Hukum, bidang Barjas, bidang Pembangunan bidang Organisasi, bidang Humas dan bidang Umum sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 100%
 4. Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 81,3. Hasil ini merupakan

hasil yang didapatkan dari hasil Total Jumlah Nilai IKM SKPD Kabupaten Sampang dibagi dengan Jumlah SKPD Kabupaten Sampang

$$\text{Didapat : } \frac{\text{Jumlah Nilai Total IKM SKPD Kab Sampang}}{\text{Jumlah Total SKPD Kab Sampang yang di IKM}} = \frac{3.739,90}{46} = 81,30$$

5. Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 130% dari 10 kebijakan dengan realisasi mencapai 13 rumusan kebijakan menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
6. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesra, bidang Hukum, bidang Barjas, bidang Pembangunan bidang Organisasi, bidang Humas dan bidang Umum sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengokordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Sebagaimana termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Sampang masih dalam kategori B
2. Rumusan kebijakan sekretariat daerah belum memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat
3. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kurang baik dan kejelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu isu-isu strategis diatas yang harus ditindaklanjuti pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang 1 (satu) tahun ke depan adalah :

1. setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan peta proses bisnis dan cascading kinerja berdasarkan RPJMD mulai dari eselon II sampai pejabat pelaksana dalam upaya mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi/instansi
2. Perlunya Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi

yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif

3. Perbaiki Prosedur pelayanan publik/SOP seperti revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik serta peningkatan profesionalisme pejabat pelayan publik.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sebagai pengampu urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati Sampang No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Dan Staf Ahli Bupati Sampang Kabupaten Sampang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dapat diukur dari :

- a. Adanya peningkatan predikat SAKIP khususnya dilingkungan Sekretariat Daerah ;
- b. Adanya peningkatan perbaikan Rumusan kebijakan melalui koordinasi antar bagian dilingkungan Sekretariat Daerah ;
- c. Adanya peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan publik khususnya dilingkungan Sekretariat Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran dan masih terdapat kecenderungan belum adanya review atas keberadaan kegiatan yang ada untuk menjawab permasalahan dan isu strategis terkini.
- b. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Prosedur pelayanan publik terlalu kaku, berbelit-belit, biaya dan waktu tidak jelas, tidak ada SOP/tidak dijalankan, dan ada persyaratan yang tidak menyambung/rasional

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang antara lain :

- a. Jumlah kualitas sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang masih kurang mengakibatkan adanya program kerja yang belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan pelayanan;
- c. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi belum optimal.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah **“Sampang Hebat Bermartabat”**.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, disusunlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.

Keterkaitan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan Misi Kepala daerah adalah pada **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin menguatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah dan tuntutan aparatur sipil negara yang profesional;
- b. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Masih adanya ketidakselarasan kebijakan antar lembaga di pemerintah pusat dan kebijakan yang berubah-ubah;

Sedangkan peluang yang ada antara lain :

- a. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang secara ideal;
- b. Adanya dukungan dan peran serta para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- c. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan pelayanan; dan
- d. Perkembangan teknologi dan informasi.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan reward and punishment
- b. Pengumpulan data kinerja harus dilakukan secara berkala dan tampak dalam laporan pengukuran kinerja;
- c. Pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi;

- d. IKU harus dimanfaatkan untuk dokumen perencanaan dan penganggaran;
- e. Hasil pengukuran kinerja harus memberikan dampak terhadap perolehan reward and punishment;
- f. IKU harus dilakukan reviu untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kepentingan organisasi;
- g. Laporan kinerja perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen serta informasi kinerja dibuat secara rinci dan detail sehingga andal
- h. Informasi kinerja harus dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- i. Melakukan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja
- j. Melakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- k. Informasi kinerja harus dapat digunakan seluruhnya dalam perbaikan perencanaan; dan
- l. Meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.05. | PEMERINTAHAN | | | | 51,236,571,159 | PEMERINTAHAN | | | | 51,236,571,159 |
| 4.05.4.05.03.0 1. | Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran | | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran | 100% | 6.230.010.260 | Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran | | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran | 100% | 6.230.010.260 |
| 4.01.4.01.01.0 1.01. | Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran | Sekretariat Daerah | a. Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun | 10.000 Surat | 3.402.864.665 | Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran | Sekretariat Daerah | a. Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun | 10.000 Surat | 3.402.864.665 |
| | | | b. Jumlah jaminan atas barang milik daerah | 3 jenis | - | | | b. Jumlah jaminan atas barang milik daerah | 3 jenis | - |
| | | | c. Cakupan pemenuhan kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi | 12 bulan | - | | | c. Cakupan pemenuhan kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi | 12 bulan | - |
| | | | d. Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 1536 eksemplar | - | | | d. Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 1536 eksemplar | - |
| | | | e. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan | 94 unit | - | | | e. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan | 94 unit | - |
| | | | f. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | 22 jenis | - | | | f. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | 22 jenis | - |
| | | | g. Jumlah Tenaga Honor Daerah | 7 orang | - | | | g. Jumlah Tenaga Honor Daerah | 7 orang | - |
| 4.05.4.05.03.0 1.02. | Penyediaan sarana administrasi perkantoran | Sekretariat Daerah | a. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor | 74 jenis | 1.393.845.595 | Penyediaan sarana administrasi perkantoran | Sekretariat Daerah | a. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor | 74 jenis | 1.393.845.595 |
| | | | b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan | 90 jenis | | | | b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan | 90 jenis | |
| | | | c. Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang | 12 bulan | | | | c. Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang | 12 bulan | |
| | | | d. Jumlah kebutuhan peralatan dan | 9 jenis | | | | d. Jumlah kebutuhan peralatan dan | 9 jenis | - |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-----------------|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai | | | | | perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai | | |
| | | | e. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah | 3 Rumah Dinas | | | | e. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah | 3 Rumah Dinas | - |
| | | | f. Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | 38 jenis | | | | f. Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | 38 jenis | |
| 4.05.4.05.03.0 1.03. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Dalam Daerah dan Luar Daerah | a. Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah | 1391 kali | 1.433.300.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Dalam Daerah dan Luar Daerah | a. Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah | 1391 kali | 1.433.300.000 |
| | | | b. Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang | 403 kali | - | | | b. Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang | 403 kali | - |
| 4.05.4.05.03.0 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100% | 9.405.114.680 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100% | 9.405.114.680 |
| 4.01.4.01.01.0 2.01. | Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor | Sekretariat Daerah | a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor | 1 gedung kantor | 833.801.435 | Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor | Sekretariat Daerah | a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor | 1 gedung kantor | 833.801.435 |
| | | | b. Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 1 gedung kantor | | | | b. Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 1 gedung kantor | |
| 4.05.4.05.03.0 2.02. | Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan | Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati | a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas | 3 Rumah Dinas | 1.211.969.920 | | | b. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas | 3 Rumah Dinas | 1.211.969.920 |
| | | | c. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah | 3 Rumah Dinas | | | | d. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah | 3 Rumah Dinas | |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | jabatan untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang | | | | | jabatan untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang | | |
| 4.05.4.05.03.0 2.03. | Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional | Sekretariat Daerah | a. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bupati (5 unit); Wakil Bupati (2 unit); Sekretaris Daerah (2 unit); Asisten (3 unit); Staf Ahli (3 unit); Kepala Bagian (9 unit); Tangki Air (1 unit); Pick Up (2 unit); Pool (5 unit) | 32 Unit | 6.583.385.000 | Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional | Sekretariat Daerah | a. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bupati (5 unit); Wakil Bupati (2 unit); Sekretaris Daerah (2 unit); Asisten (3 unit); Staf Ahli (3 unit); Kepala Bagian (9 unit); Tangki Air (1 unit); Pick Up (2 unit); Pool (5 unit) | 32 Unit | 6.583.385.000 |
| | | | b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati | 2 Unit | | | | b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati | 2 Unit | |
| | | | c. Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk Forkopimda | 4 Unit | | | | c. Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk Forkopimda | 4 Unit | |
| 4.05.4.05.03.0 2.04. | Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Sekretariat Daerah | a. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 36 unit | 652.958.500 | Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Sekretariat Daerah | a. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 36 unit | 652.958.500 |
| | | | b. Jumlah pengadaan alat rumah tangga, computer dan meja/kursi kerja pejabat | 44 unit | | | | b. Jumlah pengadaan alat rumah tangga, computer dan meja/kursi kerja pejabat | 44 unit | |
| 4.05.4.05.03.0 2.07. | Pengadaan Pakaian Dinas | | a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati | 50 orang | 122.999.825 | Pengadaan Pakaian Dinas | | a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati | 50 orang | 122.999.825 |
| | | | b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf dan | 50 orang | | | | b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf | 50 orang | |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|----------------------|---|--------------------|--|----------------|----------------------|---|--------------------|--|----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | petugas kebersihan rumah dinas | | | | | dan petugas kebersihan rumah dinas | | |
| 4.05.4.05.03.0 3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur | 100% | 251.122.000 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur | 100% | 251.122.000 |
| 4.05.4.05.03.0 3.01. | Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar | Luar Daerah | Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang berikut kewajiban Bupati mengikuti Lemhanas | 11 orang | 410.500.000 | Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar | Luar Daerah | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar | 12 ASN | 251.122.000 |
| 4.05.4.05.03.0 4. | Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik | | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu | 100% | 45.000.000 | Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik | | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu | 100% | 45.000.000 |
| 4.05.4.05.03.0 4.01. | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan | Sekretariat Daerah | a. Jumlah Laporan Kemajuan fisik /Non fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LkjIP | 6 Dok | 8.536.825 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP | 6 Dok | 15.000.000 |
| | | | a. Jumlah Laporan Akhir Tahun sebelumnya SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 6 Dok | | | | | | |
| 4.05.4.05.03.0 4.02. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD Tahun berikutnya | 4 Dok | 16.028.675 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA | 3 Dok | 15.000.000 |
| 4.05.4.05.03.0 4.03. | Peningkatan Pelayanan Informasi Publik | Sekretariat Daerah | Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah | 2 paket | 15.700.000 | Peningkatan Pelayanan Informasi Publik | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen SKM | 1 Dok | 15.000.000 |
| 4.05.4.05.03.15 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | | Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi | 100% | 2.099.995.000 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | | Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi | 100% | 2.099.995.000 |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---|----------------------------|----------------------|--|--------------------|---|----------------------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.05.4.05.03.15 .01. | Fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Sekretariat Daerah | a.Jumlah kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 369 kali | 2.068.245.000 | | Sekretariat Daerah | a.Jumlah kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 369 kali | 2.068.245.000 |
| | | | b.Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | 409 kali | | | | b.Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | 409 kali | |
| 4.05.4.05.03.15 .02. | Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah Keluarga Bupati dan Wakil Bupati | 4 keluarga | 31.750.000 | Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah Keluarga Bupati dan Wakil Bupati | 4 keluarga | 31.750.000 |
| 4.05.4.05.03.16 | Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah | | Persentase fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah | 100% | 999.550.000 | | Sekretariat Daerah | Persentase fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah | 100% | 999.550.000 |
| 4.05.4.05.03.16.01 | Fasilitasi administrasi pemerintahan | Sekretariat Daerah | jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan | 14 kali | 170.000.000 | | Sekretariat Daerah | jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan | 14 kali | 170.000.000 |
| 4.05.4.05.03.16.02 | Fasilitasi administrasi kewilayahan | Sekretariat Daerah | Jumlah dokumen rupabumi/toponomi | 1 dok dan peta | 320.000.000 | | Sekretariat Daerah | Jumlah dokumen rupabumi/toponomi | 1 dok dan peta | 320.000.000 |
| 4.05.4.05.03.16.03 | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda | Sekretariat Daerah | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda | 24 dok | 150.000.000 | | Sekretariat Daerah | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda | 24 dok | 150.000.000 |
| 4.05.4.05.03.16.04 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Sekretariat Daerah | jumlah dokumen penyusunan lppd dan ilppd yang disusun | 2 dok | 229.550.000 | | Sekretariat Daerah | jumlah dokumen penyusunan lppd dan ilppd yang disusun | 2 dok | 229.550.000 |
| 4.05.4.05.03.16.05 | Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi | 14 kec | 130.000.000 | | Sekretariat Daerah | Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi | 14 kec | 130.000.000 |
| 4.05.4.05.03.17 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | a. Persentase Produk Hukum yang diundangkan b. Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata | 100% 100% | 1.012.165.740 | | | c. Persentase Produk Hukum yang diundangkan d. Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata | 100% 100% | 1.012.165.740 |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|----------------------|---|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemerintah Daerah yang ditangani | | | | | Pemerintah Daerah yang ditangani | | |
| 4.05.4.05.03.17.01 | Penyusunan Produk Hukum | Sekretariat Daerah | a. Jumlah Perda yang diundangkan | 7 perda | 430.401.275 | | Sekretariat Daerah | b. Jumlah Perda yang diundangkan | 7 perda | 430.401.275 |
| | | | b. Jumlah Perbup yang diundangkan | 50 Perbup | | | | b. Jumlah Perbup yang diundangkan | 50 Perbup | |
| | | | a. Jumlah Raperda | 5 Raperda | | | | b. Jumlah Raperda | 6 Raperda | |
| | | | c. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan | 500 SK | | | | d. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan | 500 SK | |
| | | | e. Jumlah Naskah Akademik | 5 Naskah akademik | | | | f. Jumlah Naskah Akademik | 5 Naskah akademik | |
| 4.05.4.05.03.17.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Sekretariat Daerah | a. Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum | 350 orang | 363.320.015 | | Sekretariat Daerah | b. Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum | 350 orang | 363.320.015 |
| | | | c. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani | 4 Kasus | | | | d. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani | 4 Kasus | |
| | | | e. Jumlah Kadarkum yang dibina | 225 Keluarga | | | | f. Jumlah Kadarkum yang dibina | 225 Keluarga | |
| 4.05.4.05.03.17.03 | Fasilitasi Dokumentasi dan Informasi | Sekretariat Daerah | Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa buku Bulletin dan Buku Lembaran Daerah, Jumlah peserta sosialisasi | 360 buku dan 350 org | 218.444.450 | | Sekretariat Daerah | Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa buku Bulletin dan Buku Lembaran Daerah, Jumlah peserta sosialisasi | 360 buku dan 350 org | 218.444.450 |
| 4.05.4.05.03.18 | Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan | 100% | 1.055.212.375 | Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan | 100% | 1.055.212.375 |
| 4.05.4.05.03.18.01 | Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Sekretariat Daerah | a.Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu | 100% | 309.999.825 | Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Sekretariat Daerah | a.Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu | 100% | 309.999.825 |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|--------------------|--|--------------------|--|----------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | b.Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu | 100% | | | | b.Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu | 100% | |
| 4.05.4.05.03.18.02 | Penataan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan | Sekretariat Daerah | a. Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan | 100% | 312.975.350 | Penataan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan | Sekretariat Daerah | a. persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan | 100% | 312.975.350 |
| | | | b.Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan | 100% | | | | b. Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan | 100% | |
| | | | c.Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru | 100% | | | | c. Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru | 100% | |
| | | | d.Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah | 100% | | | | d.Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah | 100% | |
| 4.05.4.05.03.18.03 | Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah | Sekretariat Daerah | a. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Kode Wilayah dengan baik dan benar | 100% | 142.254.030 | | Sekretariat Daerah | b. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Kode Wilayah dengan baik dan benar | 100% | 142.254.030 |
| | | | c. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata Naskah Dinas dengan baik dan benar | 100% | | | | d. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata Naskah Dinas dengan baik dan benar | 100% | |
| | | | e. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atribut dengan baik dan benar | 100% | | | | f. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atribut dengan baik dan benar | 100% | |
| 4.05.4.05.03.18.04 | Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Sekretariat Daerah | a. Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang | 1 Perbub | 289.983.170 | | Sekretariat Daerah | b. Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang | 1 Perbub | 289.983.170 |
| | | | c. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana Aksi | 100 % | | | | d. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana | 100 % | |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|------------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | | | | Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | |
| | | | e. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birokrasi | 100 % | | | | f. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birokrasi | 100 % | |
| | | | g. OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur | 2 OPD | | | | h. OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur | 2 OPD | |
| | | | i. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK/WBBM menuju Zona Integritas | 8 Unit Kerja | | | | j. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK/WBBM menuju Zona Integritas | 8 Unit Kerja | |
| 4.05.4.05.03.19 | Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah | | Persentase fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah | 100% | 995.741.664 | Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah | | Persentase fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah | 100% | 995.741.664 |
| 4.05.4.05.03.19.01 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah buku pedoman, HSPK dan SSHB yang disusun | 3 dok | 298.538.199 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah buku pedoman, HSPK dan SSHB yang disusun | 3 dok | 298.538.199 |
| 4.05.4.05.03.19.02 | Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah peserta Sosialisasi | 700 org | 276908425 | Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah peserta Sosialisasi | 700 org | 276908425 |
| 4.05.4.05.03.19.03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Sekretariat Daerah | a. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun | 1 dok | 420.295.040 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Sekretariat Daerah | b. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun | 1 dok | 420.295.040 |
| | | | c. Jumlah Kegiatan Konstruksi yang diresmikan secara simbolis | 10 lokasi | | | | d. Jumlah Kegiatan Konstruksi yang diresmikan secara simbolis | 10 lokasi | |
| 4.05.4.05.03.20 | Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan | | Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi secara elektronik | 100% | 1.162.140.425 | Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan | | Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi secara elektronik | 100% | 1.162.140.425 |
| 4.05.4.05.03.20.01 | Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa | Sekretariat Daerah | Dokumen Hasil Tender | 300 Dok | 555.383.765 | Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa | Sekretariat Daerah | Dokumen Hasil Tender | 300 Dok | 555.383.765 |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--|----------------|----------------------|---|--------------------|--|----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.05.4.05.03.20.02 | Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa | Sekretariat Daerah | Jumlah sosialisasi/ pelatihan /pendampingan terkait Pengadaan Barang/ Jasa | 3 kali | 233.400.500 | Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa | Sekretariat Daerah | Jumlah sosialisasi/ pelatihan /pendampingan terkait Pengadaan Barang/ Jasa | 3 kali | 233.400.500 |
| 4.05.4.05.03.20.04 | Pengelolaan LPSE | Sekretariat Daerah | Jumlah Sistem Informasi yang dikelola | 2 aplikasi | 373.356.160 | Pengelolaan LPSE | Sekretariat Daerah | Jumlah Sistem Informasi yang dikelola | 2 aplikasi | 373.356.160 |
| 4.05.4.05.03.21 | Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah | | a. Jumlah pelaku ekonomi kreatif | 100% | 232.208.055.5 | Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah | | b. Jumlah pelaku ekonomi kreatif | 100% | 232.208.055.5 |
| | | | c. Kontribusi BUMD terhadap PAD | | | | | Kontribusi BUMD terhadap PAD | | |
| 4.05.4.05.03.21.01 | Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam | Sekretariat Daerah | Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP | 50 kali | 45.323.798 | Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam | Sekretariat Daerah | Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP | 50 kali | 45.323.798 |
| | | | Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA | 12 kali | | | | Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA | 12 kali | |
| 4.05.4.05.03.21.02 | Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian; | Sekretariat Daerah | a. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata | 24 kali | 101.247.022.5 | Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian; | Sekretariat Daerah | b. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata | 24 kali | 101.247.022.5 |
| | | | c. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata | 36 kali | | | | d. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata | 36 kali | |
| 4.05.4.05.03.21.03 | Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Sekretariat Daerah | a. Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD | 33 kali | 85.637.235 | Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Sekretariat Daerah | b. Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD | 33 kali | 85.637.235 |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| c | | | c. Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD | 80 kali | | | | d. Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD | 80 kali | |
| | | | e. Audit Apotek Trunojoyo Sampang | 1 paket | | | | f. Audit Apotek Trunojoyo Sampang | 1 paket | |
| 4.05.4.05.03.23 | Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | Persentase fasilitasi program bidang kesejahteraan rakyat | 100% | 4.445.645.955 | | | Persentase fasilitasi program bidang kesejahteraan rakyat | 100% | 4.445.645.955 |
| 4.05.4.05.03.23.01 | Fasilitasi Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan | Sekretariat Daerah | a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 13 keg | 3.793.634.710 | Fasilitasi Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan | Sekretariat Daerah | b. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 13 keg | 3.793.634.710 |
| | | | c. Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan | 13 keg | | | | d. Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan | 13 keg | |
| 4.05.4.05.03.23.03 | Fasilitasi Program Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan | Sekretariat Daerah | Jumlah Koordinasi Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kependudukan | 21 kali | 60.752.265 | Fasilitasi Program Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan | Sekretariat Daerah | Jumlah Koordinasi Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kependudukan | 21 kali | 60.752.265 |
| 4.05.4.05.03.23.04 | Fasilitasi Program Bidang Sosial dan Kesehatan | Sekretariat Daerah | a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 5 keg | 591.258.980 | Fasilitasi Program Bidang Sosial dan Kesehatan | Sekretariat Daerah | b. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 5 keg | 591.258.980 |
| | | | c. Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan | 5 keg | | | | d. Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan | 5 keg | |
| 4.05.4.05.03.24 | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | | Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai | 100% | 196.754.795 | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | | Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai | 100% | 196.754.795 |
| 4.05.4.05.03.24.01 | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan | Sekretariat Daerah | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai | 300 org | 196.754.795 | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan | Sekretariat Daerah | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai | 300 org | 196.754.795 |

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|----------------|-----------------------|--|--------------------|---|----------------|-----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai | | | | | evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai | | | | |
| 4.05.4.05.03.41 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | | Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun | 100% | 246.608.180 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | | Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun | 100% | 246.608.180 |
| 4.05.4.05.03.41.01 | Pembinaan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | a. Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu | 100% | 246.608.180 | Pembinaan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | b. Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu | 100% | 246.608.180 |
| | | | c. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai | 70% | | | | d. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai | 70% | |
| | | | e. Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik | 64 unit kerja | | | | f. Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik | 64 unit kerja | |
| 4.05.4.05.03.42 | Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan | 100% | 680.729.000 | Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan | 100% | 680.729.000 |
| .05.4.05.03.42.01 | Fasilitasi keprotokoleran | Sekretariat Daerah | Keprotokoleran acara pimpinan | 300 keg | 362.569.000 | Fasilitasi keprotokoleran | Sekretariat Daerah | Keprotokoleran acara pimpinan | 300 keg | 362.569.000 |
| .05.4.05.03.42.02 | Fasilitasi komunikasi pimpinan | Sekretariat Daerah | jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi | 12 kunjungan | 131.000.000 | Fasilitasi komunikasi pimpinan | Sekretariat Daerah | jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi | 12 kunjungan | 131.000.000 |
| .05.4.05.03.42.03 | Fasilitasi dokumentasi pimpinan | Sekretariat Daerah | Dokumentasi acara pimpinan | 200 keg | 187.160.000 | Fasilitasi dokumentasi pimpinan | Sekretariat Daerah | Dokumentasi acara pimpinan | 200 keg | 187.160.000 |
| TOTAL | | | | | 51,236,571,159 | TOTAL | | | | 51,236,571,159 |

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2021

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Sekretariat Daerah pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan Tema “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”.

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2021

| NO. | NASIONAL | JAWA TIMUR | KABUPATEN SAMPANG |
|-----|--|---|--|
| 1. | Prioritas Pembangunan 1: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Prioritas Pembangunan 1 : Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata | Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi |
| 2 | Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan | Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur | Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan |
| 3 | Prioritas Pembangunan 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing | Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) | Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan social masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar |
| 4 | Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal | Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | Prioritas Pembangunan 5: Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi |
| 6 | Prioritas Pembangunan 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim |
| 7 | Prioritas Pembangunan 7: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat | Prioritas Pembangunan 4: Percepatan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik |

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021

| NO. | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2021 |
|-----|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tujuan 1 : | | |
| | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien | Nilai Sakip | 84,01/A |
| | Sasaran 1 : | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 Nilai EKPPD | 3,23 |
| | | 2 Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas | 100% |

| | | | | |
|---|--|---|--|---------|
| | | | i. Bidang Umum | |
| | | 3 | Nilai Sakip | 84,01/A |
| 2 | Tujuan 2 : | | | |
| | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,75 |
| | Sasaran 2 : | | | |
| | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,75 |
| 3 | Tujuan 3 : | | | |
| | Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 1 | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 100% |
| | Sasaran 3 : | | | |
| | Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | | Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan | 100% |

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021

Dalam merumuskan program kegiatan Sekretariat Daerah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Sekretariat Daerah mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu Evaluasi kinerja BUMD, Pemberantasan barang kena cukai ilegal, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Selain pencapaian visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran daerah juga memperhatikan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang telah disusun.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada

pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah
- Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan
- Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Program Peningkatan Pelayanan Publik
- Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah
- Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
- Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
- Program Peningkatan Pelayanan Publik

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 pada sistem aplikasi <https://e-planning.sampangkab.go.id/> yang ditampilkan pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Perangkat Daerah : 4.05.03. -SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 1 dari 13

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| 4.05. | FUNGSI PENUNJANG LAINNYA | | | | 23.491.488.525,00 | - | - | 23.491.488.525,00 | | | 32.544.652.928,00 |
| 4.05.4.05.0 3.01. | Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran | - | | 100% | 5.200.000.000,00 | - | - | 5.200.000.000,00 | | 100% | 7.138.586.311,00 |
| 4.05.4.05.0 3.01.01. | Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran | a. Jumlah surat yang terkirim | Sekretariat Daerah Kab. Sampang | 10000 Surat | 2.700.000.000,00 | - | - | 2.700.000.000,00 | DAU | 10000 Surat | 3.751.658.293,00 |
| | | b. Jumlah jaminan atas barang milik daerah | | 3 Jenis | - | - | - | - | | 3 Jenis | - |
| | | c. Cakupan pemenuhan kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi | | 12 Bulan | - | - | - | - | | 12 Bulan | - |
| | | d. Jumlah Bahan bacaan yang disediakan | | 264 Eksemplar | - | - | - | - | | 264 Eksemplar | - |
| | | e. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan | | 78 Unit | - | - | - | - | | 78 Unit | - |
| | | f. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | | 13 Jenis | - | - | - | - | | 13 Jenis | - |
| | | g. Jumlah Tenaga Honor Daerah | | 7 Orang | - | - | - | - | | 7 Orang | - |
| 4.05.4.05.0 3.01.02. | Penyediaan sarana administrasi perkantoran | a. Jumlah Alat Tulis Kantor | Sekretariat daerah Kab. Sampang | 71 Jenis | 1.300.000.000,00 | - | - | 1.300.000.000,00 | DAU | 71 Jenis | 1.536.714.768,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| | | b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan | | 52 Jenis | - | - | - | - | | 52 Jenis | - |
| | | c. Cakupan bahan logistic dan juru masak berikut pramusaji untuk Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang | | 12 Bulan | - | - | - | - | | 12 Bulan | - |
| | | d. Jumlah barang cetakan | | 20 Jenis | - | - | - | - | | 20 Jenis | - |
| | | e. Jumlah barang penggandaan | | 150000 Lembar | - | - | - | - | | 155000 Lembar | - |
| | | f. Jumlah Komponen instalasi listrik | | 20 Jenis | - | - | - | - | | 20 Jenis | - |
| | | g. Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai | | 9 Jenis | - | - | - | - | | 9 Jenis | - |
| | | h. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga | | 3 Rumah Dinas | - | - | - | - | | 3 Rumah Dinas | - |
| 4.05.4.05.0 3.01.03. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | a. Jumlah koordinasi luar daerah | Sekretariat Daerah Kab. Sampang | 350 Kali | 1.200.000.000,00 | - | - | 1.200.000.000,00 | DAU | 350 Kali | 1.850.213.250,00 |
| | | b. Jumlah koordinasi dalam daerah | | 400 kali | - | - | - | - | | 400 kali | - |
| 4.05.4.05.0 3.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | | 100% | 5.775.000.000,00 | - | - | 5.775.000.000,00 | | 100% | 10.369.138.435,00 |
| 4.05.4.05.0 3.02.01. | Pembangunan/rehab/ pemeliharaan gedung kantor | a. Jumlah rehabilitasi dan perbaikan gedung kantor | Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 1 Gedung Kantor | 2.000.000.000,00 | - | - | 2.000.000.000,00 | DAU | 1 Gedung Kantor | 919.266.082,00 |
| | | b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | 1 Gedung Kantor | - | - | - | - | | 1 Gedung Kantor | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|-------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|------------|------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| 4.05.4.05.0 3.02.02. | Pembangunan/rehab/ pemeliharaan rumah jabatan | a. Jumlah Rumah dinas yang di Rehabilitasi | Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 3 Rumah Dinas | 1.150.000.000,00 | - | - | 1.150.000.000,00 | DAU | 3 Rumah Dinas | 1.336.196.337,00 |
| | | b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara | | 3 Rumah Dinas | - | - | - | - | | 3 Rumah Dinas | - |
| 4.05.4.05.0 3.02.03. | Pengadaan/pemeliha raan kendaraan dinas opearsional | a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan | Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 0 Unit | 1.900.000.000,00 | - | - | 1.900.000.000,00 | DAU | 0 Unit | 7.258.181.963,00 |
| | | b. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan | | 10 unit | - | - | - | - | | 0 unit | - |
| | | c. Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara | | 32 Unit | - | - | - | - | | 32 Unit | - |
| 4.05.4.05.0 3.02.04. | Pengadaan/pemeliha raan peralatan dan perlengkapan kantor | a. Jumlah pengadaan peralatan kantor | Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 14 Unit | 600.000.000,00 | - | - | 600.000.000,00 | DAU | 14 Unit | 719.886.746,00 |
| | | b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | | 36 Unit | - | - | - | - | | 36 Unit | - |
| | | c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | | 20 Unit | - | - | - | - | | 20 Unit | - |
| | | d. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bende ra yang disediakan | | 50 Unit | - | - | - | - | | 50 Unit | - |
| 4.05.4.05.0 3.02.07. | Pengadaan pakaian dinas | a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati | Sekretariat Daerah kabupaten sampang | 12 Orang | 125.000.000,00 | - | - | 125.000.000,00 | DAU | 12 Orang | 135.607.307,00 |
| | | b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf dan petugas kebersihan rumah dinas | | 35 Orang | - | - | - | - | | 35 Orang | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------------------------------|---|--|--|------------------------------|-----------------------|------------|------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| 4.05.4.05.0 3.15.01. | Fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah | a. Jumlah kunjungan kerja/inspeksi/Kepala Daerah/wakil kepala daerah | Sekretariat Daerah Kab. Sampang | 35 Kali | 2.171.657.250,00 | - | - | 2.171.657.250,00 | DAU | 35 Kali | 2.280.240.113,00 |
| | | b. Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | | 450 Kali | - | - | - | - | | 450 Kali | - |
| 4.05.4.05.0 3.15.02. | Pemeliharaan jaminan kesehatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah | a. Jumlah keluarga Bupati dan Wakil Bupati | Sekretariat Daerah Kabupaten Sampafng | 2 Keluarga | 33.337.500,00 | - | - | 33.337.500,00 | DAU | 2 Keluarga | 35.004.375,00 |
| 4.05.4.05.0 3.16. | Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Persentase fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah | | 100.00 % | 900.000.000,00 | - | - | 900.000.000,00 | | 100.00 % | 1.080.000.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.16.01. | Fasilitasi administrsai pemerintahan | a. Jumlah Fasilitasi Rakor yang SAMPANG dilaksanakan | SAMPANG | 48 Kali | 150.000.000,00 | - | - | 150.000.000,00 | Rapat Koordina si Unsur FORKOPI MDA : 24/tahun Rapat Koordina si Fasilitasi Pemerint ahan dengan OPD : 24/tahun | 48 Kali | 180.000.000,00 |
| | | b. Jumlah Rapat Koordinasi Unsur Forkopimda dan Jumlah Rapat Koordinasi Fasilitasi Pemerintahan dengan OPD | | 48 Kali | - | - | - | - | | 48 Kali | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| 4.05.4.05.0 3.16.02. | Fasilitasi administrasi kewilayahan | a. Jumlah Batas Desa yang di Adminstrasikan | sampang | 85 Paket | 280.000.000,00 | - | - | 280.000.000,00 | Pemasangan Patok Pilar Batas Desa | 85 Paket | 336.000.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.16.03. | Fasilitasi kerjasama dan otonomi daerah | a. Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Daerah | sampang | 24 Dokumen | 150.000.000,00 | - | - | 150.000.000,00 | Kerjasama Daerah | 24 Dokumen | 180.000.000,00 |
| | | b. Jumlah Kerjasama Daerah yang dilaksanakan | | 24 Dokumen | - | - | - | - | | 24 Dokumen | - |
| 4.05.4.05.0 3.16.04. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | a. Jumlah Dokumen Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ | sampang | 3 Dokumen | 230.000.000,00 | - | - | 230.000.000,00 | LPPD, ILPPD, LKPJ | 3 Dokumen | 276.000.000,00 |
| | | b. Jumlah Penyusunan Dokumen LPPD, ILPPD dan LKPJ Yang Berkualitas dan Tepat Waktu | | 3 Dokumen | - | - | - | - | | 3 Dokumen | - |
| 4.05.4.05.0 3.16.05. | Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Perangkat Daerah | a. Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan Administrasi | sampang | 14 Kecamatan | 90.000.000,00 | - | - | 90.000.000,00 | Pembinaan Administrasi Kecamatan | 14 Kecamatan | 108.000.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.17. | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase fasilitasi terhadap Cagar Budaya | | - | 1.030.000.000,00 | - | - | 1.030.000.000,00 | | - | 1.250.000.000,00 |
| | | Persentase penyelesaian kasus hukum perdata pemerintah daerah yang ditangani | | 100.00 % | | | | | | 100.00 % | |
| | | Persentase Produk Hukum yang diundangkan | | 100.00 % | | | | | | 100.00 % | |
| 4.05.4.05.0 3.17.01. | Penyusunan produk hukum | a. Jumlah Perda yang diundangkan | Bagian Hukum | 10 Perda | 420.000.000,00 | - | - | 420.000.000,00 | APBD | 10 Perda | 480.000.000,00 |
| | | b. Jumlah Perbup yang diundangkan | | 50 Perbup | - | - | - | - | | 50 Perbup | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| | | c. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan | | 500 Kepbup | - | - | - | - | | 500 Kepbup | - |
| | | d. Jumlah Raperda | | 5 Raperda | - | - | - | - | | 5 Raperda | - |
| | | e. Jumlah Naskah Akademik | | 5 Naskah Akademik | - | - | - | - | | 5 Naskah Akademik | - |
| 4.05.4.05.0 3.17.02. | Fasilitasi bantuan hukum | a. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani | Bagian Hukum | 4 Kasus | 370.000.000,00 | - | - | 370.000.000,00 | APBD | 4 Kasus | 470.000.000,00 |
| | | b. Jumlah Kadarkum yang dibina | | 225 Keluarga | - | - | - | - | | 225 Keluarga | - |
| | | c. Jumlah penyuluhan hokum terpadu | | 350 orang | - | - | - | - | | 350 orang | - |
| 4.05.4.05.0 3.17.03. | Fasilitasi dokumentasi dan informasi | a. Jumlah Peserta Sosialisasi | Bagian Hukum | 350 Orang | 240.000.000,00 | - | - | 240.000.000,00 | APBD | 350 Orang | 300.000.000,00 |
| | | b. Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa : Buku Bulletin edisi juni dan desember , Buku Lembaran Daerah | | 360 Buku | - | - | - | - | | 360 Buku | - |
| 4.05.4.05.0 3.18. | Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan | | 100.00 % | 1.040.000.000,00 | - | - | 1.040.000.000,00 | | 100.00 % | 1.215.000.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.18.01. | Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | a. Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang Yang berkualitas dan tepat Waktu | kabupaten Sampang | 100 % | 320.000.000,00 | - | - | 320.000.000,00 | DAU | 100 % | 350.000.000,00 |
| | | b. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan Tepat Waktu | | 100 % | - | - | - | - | | 100 % | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| 4.05.4.05.0 3.19. | Program Fasilitas Administrasi Pembangunan Daerah | Persentase fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah | | 100.00 % | 1.030.000.000,00 | - | - | 1.030.000.000,00 | | 100.00 % | 1.512.500.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.19.01. | Koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah | a. Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang tersusun | Kabupaten Sampang | 1 Dokumen | 345.000.000,00 | - | - | 345.000.000,00 | DAU | 1 Dokumen | 412.500.000,00 |
| | | b. Jumlah Buku SSHB (Standart Satuan Harga Barang) | | 1 Dokumen | - | - | - | - | | 1 Dokumen | - |
| | | c. Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan | | 10 Dokumen | - | - | - | - | | 10 Dokumen | - |
| | | d. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi | | 700 Peserta | - | - | - | - | | 700 Peserta | - |
| 4.05.4.05.0 3.19.02. | Pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah | a. Jumlah Buku Pengendalian Program yang disusun | Kabupaten Sampang | 1 Dokumen | 270.000.000,00 | - | - | 270.000.000,00 | DAU | 1 Dokumen | 440.000.000,00 |
| | | c. Jumlah Laporan Pengendalian | | 51 OPD | - | - | - | - | | 51 OPD | - |
| | | d. Jumlah Peserta yang dibina | | 100 PNS | - | - | - | - | | 100 PNS | - |
| 4.05.4.05.0 3.19.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan; | a. Jumlah Sistem Informasi Pelaporan Administrasi Pembangunan Daerah yang dikelola | Kabupaten Sampang | 1 Aplikasi | 415.000.000,00 | - | - | 415.000.000,00 | DAU | 1 Aplikasi | 660.000.000,00 |
| | | b. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Konstruksi | | 1 Dokumen | - | - | - | - | | 1 Dokumen | - |
| | | c. Jumlah Peresmian Kegiatan Konstruksi yang dilaksanakan | | 1 Kali | - | - | - | - | | 1 Kali | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------------------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| 4.05.4.05.0 3.20. | Program Fasilitas Unit Layanan Pengadaan | Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik | | 100.00 % | 1.100.000.000,00 | - | - | 1.100.000.000,00 | | 100.00 % | 1.406.190.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.20.01. | Pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa | a. Jumlah Dokumen Hasil Tender | Kabupaten Sampang | 300 Dokumen | 500.000.000,00 | - | - | 500.000.000,00 | DAU | 300 Dokumen | 672.014.400,00 |
| 4.05.4.05.0 3.20.02. | Pembinaan pengadaan barang/jasa | a. Jumlah sosialisasi/pelatihan/pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa | Kabupaten Sampang dan Luar Kabupaten Sampang | 3 kali | 200.000.000,00 | - | - | 200.000.000,00 | DAU | 3 kali | 282.414.600,00 |
| 4.05.4.05.0 3.20.04. | Pengelolaan LPSE | a. Jumlah Sistem Informasi yang dikelola | Kabupaten Sampang | 2 Aplikasi | 400.000.000,00 | - | - | 400.000.000,00 | DAU | 2 Aplikasi | 451.761.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.21. | Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah | Jumlah pelaku ekonomi kreatif | | 53.00 pelaku | 260.000.000,00 | - | - | 260.000.000,00 | | 53.00 pelaku | 400.000.000,00 |
| | | Kontribusi BUMD terhadap PAD | | 15.73 % | | | | | | 15.73 % | |
| 4.05.4.05.0 3.21.01. | Koordinasi dan monitoring pengelolaan sumber daya alam; | a. Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP | Kabupaten Sampang | 60 kali | 51.760.799,00 | - | - | 51.760.799,00 | DAU | 60 kali | 79.611.631,00 |
| | | b. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai pengelolaan SDA | | 15 kali | - | - | - | - | | 20 kali | - |
| 4.05.4.05.0 3.21.02. | Koordinasi pelayanan sarana perekonomian; | a. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata | Kabupaten Sampang | 27 kali | 114.901.801,00 | - | - | 114.901.801,00 | DAU | 27 kali | 176.748.773,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| 4.05.4.05.0 3.24. | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai | | 100.00 % | 250.000.000,00 | - | - | 250.000.000,00 | | 100.00 % | 275.500.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.24.02. | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan | a. Jumlah sosialisasi/penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai | Kab. Sampang | 7 Kali | 224.500.000,00 | - | - | 224.500.000,00 | DAU | 7 Kali | 250.000.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.24.03. | Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai | a. Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan DBHCHT | Kab. Sampang | 1 Laporan | 25.500.000,00 | - | - | 25.500.000,00 | DAU | 1 Laporan | 25.500.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.41. | Program Peningkatan Pelayanan Publik | - | | - | 200.000.000,00 | - | - | 200.000.000,00 | | - | 280.000.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.41.01. | Pembinaan pelayanan publik | a. Persentase Laporan Standart Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu | Kabupaten sampang | 100 % | 200.000.000,00 | - | - | 200.000.000,00 | DAU | 100 % | 280.000.000,00 |
| | | b. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai | | 80 % | - | - | - | - | | 90 % | - |
| | | c. Jumlah PD yang di Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik | | 64 Unit Kerja | - | - | - | - | | 64 Unit Kerja | - |
| 4.05.4.05.0 3.42. | Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan | | 100.00 % | 640.000.000,00 | - | - | 640.000.000,00 | | 100.00 % | 734.500.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.42.01. | Fasilitasi keprotokoleran | a. Keprotokoleran acara pimpinan | Sampang | 300 kegiatan | 350.000.000,00 | - | - | 350.000.000,00 | DAU | 300 kegiatan | 398.500.000,00 |
| 4.05.4.05.0 3.42.02. | Fasilitasi komunikasi pimpinan | a. jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi | Sampang | 12 kunjungan | 130.000.000,00 | - | - | 130.000.000,00 | DAU | 12 kunjungan | 136.500.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD | APBD Prov. | APBN | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (6 + 7 + 8) | 10 | 11 | 12 |
| 4.05.4.05.0 3.42.03. | Fasilitasi dokumentasi pimpinan | a. dokumentasi acara pimpinan | Sampang | 200 kegiatan | 160.000.000,00 | - | - | 160.000.000,00 | - | 200 kegiatan | 199.500.000,00 |
| TOTAL | | | | | 23.491.488.525,00 | - | - | 23.491.488.525,00 | | | 32.544.652.928,00 |

SAMPANG, 08 Oktober 2020

NIP.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021

Sekretariat Daerah mengampu urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Program-program Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Percepatan Reformasi Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2021**

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |
|--------------------------|---|--|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Belanja Langsung (BL) | | | 29.212.641.629 |
| 4.01. | SEKRETARIAT DAERAH | | | 29.212.641.629 |
| | BAGIAN UMUM | | | |
| 4.05.4.05.03.0 1. | Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran | 100% | 6.230.010.260 |
| 4.05.4.05.03.0 1.01. | Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran | a. Jumlah Surat Terkirim | 873 Surat | 3.402.864.665 |
| | | b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi | 12 Bulan | |
| | | c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan | 27 Unit | |
| | | d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan | 4 Ob | |
| | | e. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis | 14 Ob | |
| | | f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 1095 exp | |
| | | g. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman | 866 ok | |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------|----------------------|
| 4.05.4.05.03.0 1.02. | Penyediaan sarana administrasi perkantoran | a. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor | 74 jenis | 1.393.845.595 |
| | | b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan | 90 jenis | |
| | | c. Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang | 12 bulan | |
| | | d. Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai | 9 jenis | |
| | | e. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah | 3 Rumah Dinas | |
| | | f. Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | 38 jenis | |
| | | g. Jumlah surat-surat/ blanko/ formulir yang diperbanyak (cetak dan fotocopy/ penggandaan) | 24 jenis | |
| 4.05.4.05.03.0 1.03. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | a. Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah | 1391 kali | 1.433.300.000 |
| | | b. Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang | 403 kali | |
| 4.05.4.05.03.0 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100% | 9.405.114.680 |
| 4.05.4.05.03.0 2.01. | Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor | a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor | 1 gedung kantor | 833.801.435 |
| | | b. Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 1 gedung kantor | |
| 4.05.4.05.03.0 2.02. | Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan | a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas | 3 Rumah Dinas | 1.211.969.920 |
| | | b. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang | 3 Rumah Dinas | |
| 4.05.4.05.03.0 2.03. | Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional | a. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bupati (5 unit); Wakil Bupati (2 unit); Sekretaris Daerah (2 unit); Asisten (3 unit); Staf Ahli (3 unit); Kepala Bagian (9 unit); Tangki Air (1 unit); Pick Up (2 unit); Pool (5 unit) | 32 Unit | 6.583.385.000 |
| | | b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati | 2 Unit | |
| | | c. Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk Forkopimda | 4 Unit | |

| | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------|----------------------|
| 4.05.4.05.03.0 2.04. | Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | a. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 36 unit | 652.958.500 |
| | | b. Jumlah pengadaan alat rumah tangga, computer dan meja/kursi kerja pejabat | 44 unit | |
| 4.05.4.05.03.0 2.07. | Pengadaan Pakaian Dinas | a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati | 50 orang | 122.999.825 |
| | | b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf dan petugas kebersihan rumah dinas | 50 orang | |
| 4.05.4.05.03.0 3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur | 100% | 410.500.000 |
| 4.05.4.05.03.0 3.01. | Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar | Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang berikut kewajiban Bupati mengikuti Lemhanas | 11 orang | 410.500.000 |
| 4.05.4.05.03.0 4. | Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu | 100% | 45.000.000 |
| 4.05.4.05.03.0 4.01. | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan | a. Jumlah Laporan Kemajuan fisik /Non fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LkjiP | 6 Dok | 8.536.825 |
| | | a. Jumlah Laporan Akhir Tahun sebelumnya SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang | 6 Dok | |
| 4.05.4.05.03.0 4.02. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD Tahun berikutnya | 4 Dok | 16.028.675 |
| 4.05.4.05.03.0 4.03. | Peningkatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah | 2 paket | 15.700.000 |
| 4.05.4.05.03.15 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi | 100% | 2.099.995.000 |
| 4.05.4.05.03.15.01 | Fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | a. Jumlah kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 369 kali | 2.068.245.000 |
| | | b. Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | 409 kali | |
| 4.05.4.05.03.15.02 | Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jumlah Keluarga Bupati dan Wakil Bupati | 4 keluarga | 31.750.000 |
| | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4.05.4.05.03.16 | Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Persentase fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah | 100% | 999.550.000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| 4.05.4.05.03.16.01. | Fasilitasi administrasi pemerintahan | jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan | 14 kali | 170.000.000 |
| 4.05.4.05.03.16.02. | Fasilitasi administrasi kewilayahan | Jumlah dokumen rupabumi/toponomi | 1 dok dan peta | 320.000.000 |
| 4.05.4.05.03.16.03. | Fasilitasi kerjasama dan otonomi daerah | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda | 24 dok | 150.000.000 |
| 4.05.4.05.03.16.04. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | jumlah dokumen penyusunan lppd dab ilppd yang disusun | 2 dok | 229.550.000 |
| 4.05.4.05.03.16.05. | Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah | Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi | 14 kec | 130.000.000 |
| | BAGIAN HUKUM | | | |
| 4.05.4.05.03.17. | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | a. Persentase Produk Hukum yang diundangkan b. Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata Pemerintah Daerah yang ditangani | 100% 100% | 1.012.165.740 |
| 4.05.4.05.03.17.01. | Penyusunan Produk Hukum | a. Jumlah Perda yang diundangkan | 7 perda | 430.401.275 |
| | | b. Jumlah Perbup yang diundangkan | 50 Perbup | |
| | | c. Jumlah Raperda | 5 Raperda | |
| | | d. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan | 500 SK | |
| | | e. Jumlah Naskah Akademik | 5 Naskah akademik | |
| 4.05.4.05.03.17.02. | Fasilitasi Bantuan Hukum | a. Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum | 350 orang | 363.320.015 |
| | | b. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani | 4 Kasus | |
| | | c. Jumlah Kadarkum yang dibina | 225 Keluarga | |
| 4.05.4.05.03.17.03 | Fasilitasi Dokumentasi dan Informasi | Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa buku Bulletin dan Buku Lembaran Daerah, Jumlah peserta sosialisasi | 360 buku dan 350 org | 218.444.450 |
| | BAGIAN ORGANISASI | | | |
| 4.05.4.05.03.18. | Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan | 100% | 1.055.212.375 |
| 4.05.4.05.03.18.01 | Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | a. Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu | 100% | 309.999.825 |
| | | b. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu | 100% | |
| 4.05.4.05.03.18.02 | Penataan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan | a. Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan | 100% | 312.975.350 |
| | | b. Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan | 100% | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------|----------------------|
| | | c. Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru | 100% | |
| | | d. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah | 100% | |
| 4.05.4.05.03.18.03 | Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah | a. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Kode Wilayah dengan baik dan benar | 100% | 142.254.030 |
| | | b. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata Naskah Dinas dengan baik dan benar | 100% | |
| | | c. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atribut dengan baik dan benar | 100% | |
| 4.05.4.05.03.18.04 | Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah | a. Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang | 1 Perbub | 289.983.170 |
| | | b. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 100 % | |
| | | c. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birokrasi | 100 % | |
| | | d. OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur | 2 OPD | |
| | | e. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK/WBBM menuju Zona Integritas | 8 Unit Kerja | |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | |
| 4.05.4.05.03.19. | Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah | Persentase fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah | 100% | 995.741.664 |
| 4.05.4.05.03.19.01 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Jumlah buku pedoman, HSPK dan SSHB yang disusun | 3 dok | 298.538.199 |
| 4.05.4.05.03.19.02 | Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah | Jumlah peserta Sosialisasi | 700 org | 276908425 |
| 4.05.4.05.03.19.03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | a. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun | 1 dok | 420.295.040 |
| | | b. Jumlah Kegiatan Konstruksi yang diresmikan secara simbolis | 10 lokasi | |
| | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | | | |
| 4.05.4.05.03.20. | Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan | Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi secara elektronik | 100% | 1.162.140.425 |
| 4.05.4.05.03.20.01 | Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa | Dokumen Hasil Tender | 300 Dok | 555.383.765 |
| 4.05.4.05.03.20.02 | Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah sosialisasi/ pelatihan/pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa | 3 kali | 233.400.500 |
| 4.05.4.05.03.20.04 | Pengelolaan LPSE | Jumlah Sistem Informasi yang dikelola | 2 aplikasi | 373.356.160 |

| | | | | |
|--------------------|---|--|-------------|----------------------|
| | BAGIAN PEREKONOMIAN DN SUMBER DAYA ALAM | | | |
| 4.05.4.05.03.21. | Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah | a. Jumlah pelaku ekonomi kreatif | 100% | 232.208.055.5 |
| | | b. Kontribusi BUMD terhadap PAD | | |
| 4.05.4.05.03.21.01 | Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam | Jumlah fasilitas, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP | 50 kali | 45.323.798 |
| | | Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA | 12 kali | |
| 4.05.4.05.03.21.02 | Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian; | a. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata | 24 kali | 101.247.022.5 |
| | | b. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata | 36 kali | |
| 4.05.4.05.03.21.03 | Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | a. Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD | 33 kali | 85.637.235 |
| | | b. Jumlah fasilitas dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD | 80 kali | |
| | | c. Audit Apotek Trunojoyo Sampang | 1 paket | |
| | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| 4.05.4.05.03.23 | Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Persentase fasilitas program bidang kesejahteraan rakyat | 100% | 4.445.645.955 |
| 4.05.4.05.03.23.01 | Fasilitas Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan | a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 13 keg | 3.793.634.710 |
| | | b. Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan | 13 keg | |
| 4.05.4.05.03.23.03 | Fasilitas Program Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan | Jumlah Koordinasi Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kependudukan | 21 kali | 60.752.265 |
| 4.05.4.05.03.23.04 | Fasilitas Program Bidang Sosial dan Kesehatan | a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 5 keg | 591.258.980 |
| | | b. Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan | 5 keg | |
| | BAGIAN PEREKONOMIAN DN SUMBER DAYA ALAM | | | |
| 4.05.4.05.03.24. | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai | 100% | 196.754.795 |
| 4.05.4.05.03.24.01 | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai | 300 org | 196.754.795 |

| | | | | |
|------------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| | evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai | | | |
| | BAGIAN ORGANISASI | | | |
| 4.05.4.05.03.41 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun | 100% | 246.608.180 |
| 4.05.4.05.03.41.01 | Pembinaan pelayanan publik | a. Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu | 100% | 246.608.180 |
| | | b. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai | 70% | |
| | | c. Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik | 64 unit kerja | |
| | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | | | |
| 4.05.4.05.03.42 | Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan | 100% | 680.729.000 |
| 4.05.4.05.03.42.01 | Fasilitasi keprotokoleran | Keprotokoleran acara pimpinan | 300 keg | 362.569.000 |
| 4.05.4.05.03.42.02 | Fasilitasi komunikasi pimpinan | jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi | 12 kunjungan | 131.000.000 |
| 4.05.4.05.03.42.03 | Fasilitasi dokumentasi pimpinan | Dokumentasi acara pimpinan | 200 keg | 187.160.000 |
| TOTAL | | | | 51.236.571.159 |

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah akan melaksanakan Urusan Unsur Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran **Rp 51.236.571.159,00** yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 15 program dan 43 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Sekretariat Daerah dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021

Ada 4 Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 diantaranya adalah:

1. So Religie

Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan ulang organisasi perangkat daerah (perampingan perangkat daerah), yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diharapkan membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Tujuan :

1. Birokrasi lebih dinamis dan lincah

2. Percepatan sistem kerja
3. Mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal
4. Mewujudkan profesionalitas ASN
5. Mengefisiensi belanja birokrasi

Manfaat :

Mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga kinerja Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien dan efektif.

2. Peningkatan Kinerja PDAM Trunojoyo Sampang dengan Pembentukan Dewan Pengawas

PDAM merupakan BUMD Kab Sampang yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kab. Sampang. Oleh karena itu guna meningkatkan kinerja PDAM Trunojoyo Sampang, perlu dibentuk Dewan Pengawas PDAM

Tujuan dan Manfaat :

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Perumda Trunojoyo Sampang yang akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat dibidang perairan.

3. Percepatan dan Ketepatan Realisasi Pelaksanaan

Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam daerah terdampak kegiatan migas yang dilakukan oleh KKKS Migas cluster Sampang. Sehingga KKKS Migas cluster Sampang wajib melaksanakan PPM di Kabupaten Sampang yang sasarannya adalah masyarakat di daerah terdampak migas. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sampang wajib untuk memastikan agar pelaksanaan PPM tersebut bisa bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Sampang. Maka perlu dipastikan jika pelaksanaan PPM tersebut tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan Pemkab Sampang serta terealisasi dengan tepat sasaran melalui :

1. Pembentukan Tim Pengembangan Masyarakat Kabupaten Masyarakat
2. Melaksanakan Jaring Aspirasi Masyarakat di tingkat desa dalam penentuan usulan kegiatan PPM yang akan dilaksanakan
3. Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan hasil jasmag agar tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang telah didanai oleh Pemerintah Kabupaten Sampang

4. Melakukan monitoring hasil pelaksanaan PPM.

Tujuan dan Manfaat :

Mensinergikan pelaksanaan PPM Migas oleh KKKS Migas Cluster Sampang dengan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sampang

4. Pengendalian Inflasi daerah

Inflasi adalah meningkatnya harga barang dan jasa. Secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan terjadi terus menerus. Pemerintah Kabupaten Sampang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, karena dengan inflasi yang rendah dan stabil akan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga daya beli masyarakatpun meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat

Tujuan dan Manfaat :

Menjaga agar inflasi rendah, stabil dan terkendali

BAB V PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang yang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan teknis yang memuat rencana program dan kegiatan dalam urusan pemerintahan yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan hasil evaluasi atas Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun lalu.


Dengan adanya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan arah kebijakan program dan kegiatan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pada Sekretariat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;

3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.


BUPATI SAMPANG,
H. SLAMET JUNAIDI